

LAH1PIRAN : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI **PEMERINTAH** KABUPATEN
 MAJALENGKA
 NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 JUNI 2025
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 2 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	mengganggu proses pelaksanaan kegiatan program	hanya dapat diakses oleh instansi yang berwenang dalam hal pemeriksaan dan atas ijin pimpinan	sesuai aturan penyimpanan arsip pertanggung jawaban kegiatan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2	Disposisi Surat Pimpinan	Huruf l pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	sampai adanya tindaklanjut dari unit pengelola surat
3	Surat penting yang perlu dirahasiakan	Huruf l pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008 Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses pelaksanaan Kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlangsung
4	Dokumen berkas usulan Kenaikan Pangkat	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya Keputusan Kenaikan Pangkat
5	Hasil verifikasi berkas usulan kenaikan pangkat	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya Keputusan Kenaikan Pangkat
6	Daftar nilai hasil ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya sertifikat hasil ujian dinas
7	Dokumen tahapan seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak ada batas waktu

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
8	Hasil Assesment / Uji Kompetensi ASN	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap pribadi ASN	rahasia Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan
9	Dokumen usulan pemberhentian ASN dari jabatan fungsional dan jabatan administrasi	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap pribadi ASN	rahasia Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberhentian dari jabatan
10	Dokumen usulan perpindahan ASN ke dan/dari jabatan fungsional / jabatan administrasi	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap pribadi ASN	rahasia Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya surat keputusan
11	Data usulan pemberhentian dan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap pribadi ASN	rahasia Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya surat keputusan
12	Dokumen usulan mutasi ASN kedalam dan keluar instansi	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap pribadi ASN	rahasia Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai dengan terbitnya surat keputusan
13	Biodata ASN	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap pribadi ASN	rahasia Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14	Konfigurasi data base dan aplikasi serta username dan password	Huruf c pasal 17 UU 14 Th 2008	Membahayakan keamanan negara / badan publik	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak ada batasan waktu
15	Arsip berkas usul Karis / Karsu / Kapeg / konversi NIP	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi dan anggota keluarga bersangkutan	Hanya dapat diakses oleh instansi yang berwenang/berkepentingan dan atas seijin pimpinan, seijin yang bersangkutan	Sampai dengan terbitnya Karis / Karsu / Kapeg / konversi NIP
16	Daftar nominatif ASN yang akan pensiun	Huruf b pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat	Hanya dapat diakses oleh unit kerja tempat ASN tersebut bekerja untuk kepentingan pemberkasan usul pensiun, atau instansi yang berwenang/berkepentingan atau atas seijin dan kebijakan pimpinan	Sampai terbitnya SK Pensiun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
17	Arsip berkas usul pemberhentian / pensiun	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi dan anggota keluarga bersangkutan	Hanya dapat diakses oleh instansi yang berwenang/berkepentingan dan atas seizin pimpinan atau yang bersangkutan atau ahli waris	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi yang berwenang
18	Arsip SK Pemberhentian / pensiun	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi dan anggota keluarga bersangkutan	Hanya dapat diakses oleh instansi yang berwenang/berkepentingan dan atas seizin pimpinan atau yang bersangkutan atau ahli waris	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi yang berwenang
19	Arsip / scan file berkas lamaran calon ASN	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi dan anggota keluarga bersangkutan	Hanya dapat diakses oleh instansi yang berwenang / berkepentingan dan atas seizin pimpinan atau seizin yang bersangkutan	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi yang berwenang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
20	Dokumen / Berkas / Arsip ASN	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap rahasia pribadi dan anggota keluarga bersangkutan	Hanya dapat diakses oleh instansi yang berwenang / berkepentingan dan atas seizin pimpinan atau seizin yang bersangkutan	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi yang berwenang
21	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
22	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
23	Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Huruf h pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan acara prematur	Menjaga iklim konsusif di lingkungan tempat kerja	Sampai dengan pelantikan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
24	Arsip dinamis menurut sifatnya rahasia	Huruf i pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	melindungi dokumen rahasia	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi berwenang
25	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Huruf j pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Menghambat kesuksesan karena adanya pengungkapan secara prematur (	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran yang wajar	Selama proses pengadaan barang / jasa
		Perpres No 54 tahun 2010	Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian		
		Perpres No 80 Th 2003 beserta perubahannya	tidak objektif)		
26	Dokumen penawaran kontrak	Huruf j pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selama proses pengadaan barang / jasa
		Perpres No 80 Th 2003 beserta perubahannya			
27	Lokasi server	UU no 11 Th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (pasal 30 s/d 37)	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat serta data	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi yang berwenang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
28	Sistem Manajemen Data Base	Huruf j pasal 17 UU nomor : 14 Th 2008 UU no 11 Th 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi yang berwenang
29	Hasil pemeriksaan Reguler, Kasus, Khusus, Laporan Keuangan, Evaluasi / pemantauan (Inspektorat / BPK, badan pemeriksa negara lainnya)	UU No 14 Th 2008 pasal pasal 17 huruf i PP No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (pasal 23) Peraturan Menpan RB No : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Standar audit pengawasan intern Pemerintah Permendagri No 28 Th 2007 tentang Norma pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawas pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP Melanggar Permenpan RB tentang batasan distribusi LHP	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Permendagri No 51Th 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
30	SPJ (Surat Pertanggungjawaban)	UU No 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara UU No 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Mengungkap data ketidakwajaran	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Sampai dengan selesainya pemeriksaan dari APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah)
31	Peta lokasi penyimpanan arsip	UU No 14 Th 2008 pasal 17 huruf i UU No 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 (3) i	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut bisinya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Selama masih berlaku
32	Arsip peta foto udara	UU No 14 Th 2008 pasal 17 huruf d UU No 43 Th 2009 tentang Kearsipan, pasal 66 (3) d	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
33	Disposisi surat pimpinan	UU No 14 Th 2008 pasal 17 huruf i	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari perangkat daerah pengolah surat
34	Dokumen pengelolaan kepegawaian (kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan administrasi kepegawaian)	UU No 14 Th 2008 pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data ASN yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari ASN bersangkutan
35	Berita sandi	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
38	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
37	Perangkat khusus persandian	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
38	Kunci sistem sandi	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
39	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
40	Jalur komunikasi VVIP	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
41	Frekuensi radio komunikasi persandian	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
42	Berita/Radiogram rahasia	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
43	Internet Address Private Protocol/IP	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat mengganggu keamanan data / system pada badan publik	Melindungi data / system pada badan publik	Selama masih digunakan/berlaku

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j			
44	Sistem Keamanan Informasi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat mengganggu keamanan data / system pada badan publik	Melindungi data / system pada badan publik	Selama masih digunakan/berlaku
45	Kode akses Elektronik	UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dn Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Dapat mengganggu keamanan data / system pada badan publik	Melindungi data / system pada badan publik	Selama masih digunakan/berlaku
46	System Keamanan Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Dapat mengganggu keamanan data / system / hak akses pada badan publik	Melindungi keamanan data / system / hak akses pada badan publik	Selama masih digunakan/berlaku
		UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 1 angka 16)			
47	System Keamanan Database	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu keamanan data / system / hak akses pada badan publik	Melindungi keamanan data / system / hak akses pada badan publik	Selama masih digunakan/berlaku
		UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 1 angka 16)			

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
48	Surat Rahasia	UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terbatas
49	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf l dan j	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan
50	Informasi data pribadi	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
51	Sistem Keamanan	UU no 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 25 Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf l dan j	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan / digunakan
52	Dokumen hasil pemeriksaan Inspektorat / BPK	Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD; UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas-asas pengelolaan administrasi keuangan	Setelah selesainya audit

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf l dan j			
53	Arsip peta foto udara	UU No 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf l dan j	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam
54	Biodata Elektronik ASN Database)	(UU no 14 Th 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi yang berwenang
55	Dokumen / berkas / Arsip ASN	UU no 14 Th 2008 ttg KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi berwenang
56	Daftar Nilai DP-3 PNS atau PPK PNS	UU no 14 Th 2008 ttg KIP pasal 17 huruf i Pasal 6 PP No 10 Th 1979 Ttg Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi berwenang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
57	Data Kependudukan / Elemen Data Penduduk	Pasal 79 UU No 24 Th 2013 Ttg Adminduk	Mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data penduduk dan elemen data penduduk	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi berwenang
58	Internet Protocol / IP Address Private, akun dan sandi pengelola SIAK	UU No 14 Th 2008 Ttg KIP UU 11 Th 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik	Adanya penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain	Melindungi dari penyalahgunaan hak akses	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi berwenang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
59	Surat pengaduan masyarakat tentang ketenagakerjaan	UU No 14 tahun 2008 pasal 17	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	Tidak ada batas waktu kecuali oleh pihak / instansi berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh sebagaimana tercantum dalam daftar hadir, sehingga lembaran ini bagian tidak terpisahkan daripada daftar hadir
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN MAJALENGKA



H. GATOT SULAEMAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760528 199412 1 001